

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan Pustaka

Terkait dengan studi tentang Analisis Penerapan Pendekatan Sosiologis Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2023 (Studi Kasus di Desa Baopana Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata), banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sebagai acuan dalam mengkaji, membahas, dan memperjelas masalah dalam penelitian ini, maka diberikan beberapa sumber dan referensi untuk dijadikan perbandingan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian Safitri A. Retno (2016) yang berjudul “Perilaku Memilih Masyarakat Muslim pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”. Dalam penelitian ini, menggunakan tiga pendekatan utama yaitu, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan dalam menentukan pilihan partai politik ketika pemilu adalah kesesuaian program dan pemberian imbalan uang. Sedangkan dua variabel yaitu identifikasi partai dan ormas keagamaan tidak memiliki hubungan dengan pilihan politik warga Kecamatan Kapas dalam Pemilu Legislatif 2014.¹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sofianto Arif yang berjudul “Peran Agama Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai agama menjadi

¹ Safitri Ayu Retno. 2016. Perilaku Memilih Masyarakat Muslim pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Politik Muda. Volume 5 (2): 247-255

landasan dan rujukan dalam menilai figur politik yang baik dan buruk, tanpa melihat latar belakang partai dan ideologinya. Pemilih dipengaruhi oleh pertimbangan rasionalitas diri sendiri dibanding tokoh atau organisasi agama.²

Berdasarkan kajian pustaka penelitian terdahulu, terdapat persamaan yang mendasar dengan penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tentang perilaku memilih. Yang membedakannya dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu, menggunakan 3 pendekatan yaitu, sosiologis, psikologis dan pilihan rasional sementara dalam penelitian ini fokus penelitian menggunakan pendekatan sosiologis. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sementara dalam penelitian ini, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Baopana Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

1.2 Landasan Teoritis

1.2.1 Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Menurut Almond dan Verba budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara, terhadap sistem politik dan aneka

² Sofianto Arif. 2015. Peran Agama Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Tengah. *Journal of Social Science and Religion*. Volume 22 (2): 161-172

ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.³

Sementara itu, Budiardjo menyatakan Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu, sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya politik adalah orientasi politik dan sikap individu-individu dalam hubungannya dengan sistem politik.

b. Konsep Budaya Politik

Konsep untuk menganalisis budaya politik dibangun baik ditingkat individu maupun di tingkat sistem. Dalam *The Civic Culture* Almond dan Verba menyempurnakan konsepsi budaya politik dengan mendefinisikan budaya politik dalam pengertian orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka yaitu:

1. Orientasi Kognitif (*Cognitive Orientation*) merupakan pengetahuan masyarakat, tentang sistem politik, peran, dan segala kewajibannya,

³ Sucipto Adi. 2015. Budaya Politik Lokal dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Jurnal Ilmu Sosial Mahakam. Volume 4. Hal 34

termasuk pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Orientasi Afektif (*Affective Orientation*) merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik, dan peranannya serta tokoh-tokoh politik. Sebagai bentuk aplikasinya yaitu perasaan masyarakat untuk menerima atau menolak sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
3. Orientasi Evaluatif (*Evaluation Orientation*) merupakan keputusan dan pendapat masyarakat tentang objek-objek politik, yang secara tipikal melibatkan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka miliki.

Dari ketiga orientasi politik di atas, terdapat kausalitas berlangsung dua arah yaitu sikap mempengaruhi struktur dan perilaku dan struktur dan kinerja mempengaruhi sikap. Sehingga budaya politik mempengaruhi struktur dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, ketiga orientasi tersebut menunjukkan bahwa budaya politik cukup lentur dan dapat berubah secara dramatis sebagai respon terhadap kinerja rezim, pengalaman sejarah dan sosialisasi politik.⁴

c. Aspek Budaya Politik

Secara garis besar, budaya politik pemilih di Indonesia setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu, budaya

⁴ Suryo Herning. 2015. Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang Suatu Perbandingan. Jurnal Transformasi No. 27. Volume 1. Hal 32-33

politik pemilih idealis, Budaya Politik Protes Dan Budaya Politik Kompromistik.

1. Budaya Politik Idealis.

Dalam budaya politik idealis, pemilih melihat pemilu adalah sarana memperjuangkan idealisme. Pemilu adalah arena yang ideal untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Aktivitas politik pemilih dalam pemilu, didorong oleh motif-motif yang bersifat memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Akibatnya, pemilih berpartisipasi dalam pemilu, dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran. Pemilih menyadari bahwa manfaat langsung dari pemilu tidak dipetik saat voting dilakukan, akan tetapi manfaat akan diperoleh dari sebuah proses panjang politik.

2. Budaya Politik Pemilih Protes

Pada tipe budaya politik pemilih protes, pemilih terlibat dalam aktivitas pemilu atau voting dengan cara, harus diberi kompensasi uang. Apabila tidak ada kompensasi, pemilih enggan untuk terlibat dalam aktivitas kampanye, menggunakan hak pilihnya, atau setidaknya tidak akan memilih partai atau kandidat yang tidak memberikan kompensasi, bahkan pada tindakan golput.

3. Budaya Politik Kompromitis

Ini merupakan budaya politik, yang melihat tindakan voting dianggap sebagai kewajiban daripada hak politik. Bedanya dengan budaya protes terkait dengan kompensasi adalah, kompensasi pada

budaya politik protes menjadi prioritas yang menentukan pilihan politik. Sedangkan pada budaya pemilih kompromistis, faktor kompensasi bukan menjadi sebab perilaku memilihnya.

Konstitusional, maka keabsahan otoritas tidak lagi dirugikan dan dapat dipastikan akan adanya dukungan bagi keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang dikeluarkan. Kebebasan sebuah sistem akan berjalan berbarengan dengan ketaatan dari warga anggota sistem yang bersangkutan. Menurut Almond, legitimasi yang diperoleh lewat proses politik yang membandingkan pemberian kompensasi, dalam budaya politik juga ada tiga aspek budaya politik yaitu: orientasi terhadap sistem, orientasi terhadap proses politik dan orientasi terhadap kebijakan publik.

1. Aspek Yang Menentukan Keabsahan (*Legitimacy*) Para Otoritas Politik.

Dalam sistem demokrasi modern, keabsahan penguasa tergantung pada proses politik yang demokratis. Jika otoritas yang berkuasa terpilih untuk duduk pada jabatan lewat proses pemilihan yang dapat diterima dan peraturan atau kebijakan yang dibuat mengikuti prosedur demokratis akan lebih menjamin kestabilan didalam sistem politik.

2. Aspek Yang Berorientasi Terhadap Proses Politik.

Orientasi Kognitif, Afektif Dan Evaluatif merupakan dasar pembentukan tipologi budaya politik. Menurut Almond dan verba

ada tiga macam tipe budaya politik yaitu Parokial, Subjek, dan Partisipan.

- a) Parokial (*picik, sempit*) menyiratkan bahwa individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah, dan umumnya tidak merasa terlibat.
- b) Subyek dimana individu-individu peduli dengan keluaran-keluaran yang dicapai pemerintah, namun tidak berpartisipasi dalam proses-proses yang menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan.
- c) Partisipan yaitu individu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem secara utuh, yaitu dalam proses-proses input maupun outputnya.

3. Aspek Yang Berkaitan Dengan Pola Yang Berorientasi Terhadap Kebijakan Publik.

Berdasarkan aspek ini maka rakyat menilai bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Jika dipandang sebuah tindakan, maka dapat mempengaruhi kondisi sosial yang ada dan pasti akan ada dorongan untuk memberi desakan pada kebijakan yang dapat mengubah kondisi menuju yang dicita-citakan. Pilihan kebijakan publik, dengan demikian merupakan pilihan-pilihan *performance* (kinerja) sistem politik, yaitu kemampuannya untuk menarik atau mendistribusikan sumber daya sosial dan mengatur tingkah laku. Biasanya pilihan-pilihan tersebut merupakan strategi atau

keinginan untuk mencapai hasil sosial melalui berbagai tindakan politik. Perbedaan politik, biasa disebabkan karena adanya perbedaan teori, tentang bagaimana mencapai hasilnya. Perbedaan persepsi tentang kondisi sosial, yang ada dalam masyarakat saat ini atau karena perubahan gagasan tentang hasil sosial yang ideal (Almond dan Powell, 1978:39-43).

1.2.2 Tinjauan Mengenai Perilaku Memilih

a. Pengertian Perilaku Memilih

Menurut Ramlan Surbakti Perilaku pemilih adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y.⁵ Sedangkan menurut Mahendra perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai atau kandidat tertentu.

Perilaku memilih tidak sekedar perilaku individu yang bersifat rasional. Ada unsur refleksi budaya, ekonomi, ataupun politik yang

⁵ Surbakti Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta. Hal 185-186

mempengaruhinya. Untuk memperoleh gambaran yang cukup komprehensif tentang fenomena pemilu, metode community dynamic study tampaknya memadai untuk digunakan. Jenis penelitian ini, bertolak dari asumsi bahwa tingkah laku politik sangat dipengaruhi oleh situasi komunitas dimana seseorang berada. Karenanya untuk, memahami tingkah laku individual, termasuk keputusan memilih dalam suatu pemilu, harus dihubungkan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, interaksi sosial ini, akan membangun kesamaan persepsi antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan interpretasi seseorang, terhadap suatu fenomena sosial.

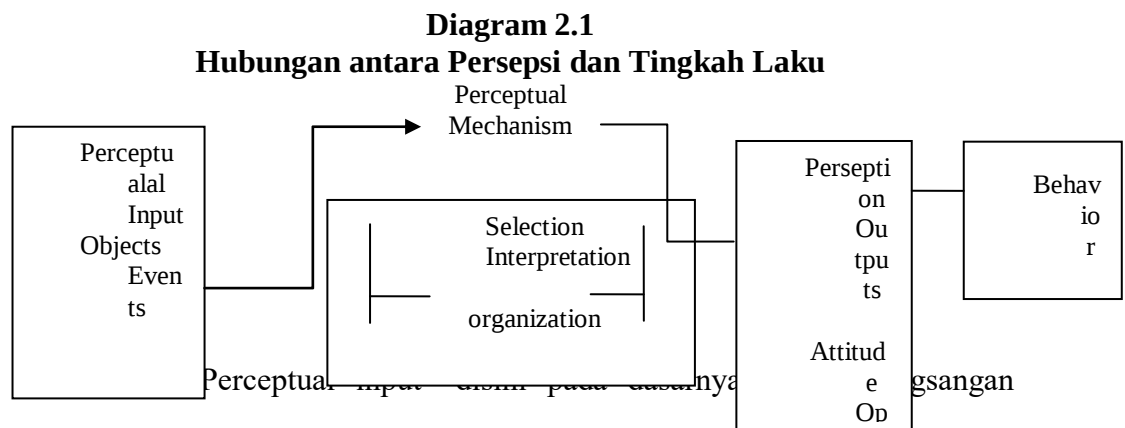
Persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang diyakini dengan hal-hal yang diharapkan. Semakin kecil jarak (*gap*) antara keduanya, akan semakin baik persepsi seseorang terhadap suatu fenomena. Karena itu, persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa lalu, latar belakang sosial budaya, motivasi dan suasana hati.⁶

Perspsi sangat menentukan sikap seseorang. Melalui persepsi yang berfungsi sebagai filter (*penyaring*), seseorang membangun kepercayaan dan motivasi terhadap satu stimulus (dalam hal ini fenomena sosial), yang kemudian menentukan perilaku seseorang.⁷

⁶ Peter Bryant, Perception and Understanding in Young Children, dalam Servatius Rodriques dkk, Modul Sistem Politik Indonesia, hal. 49-50

⁷ Fremond R. Kast and J.E Ronszenwigh, Organization and Management, dalam Servatius Rodriques dkk, Modul Sistem Politik Indonesia, hal. 50

Peran sentral persepsi dalam membentuk atau menentukan tingkah laku seseorang, digambarkan dalam satu diagram oleh Chung dan Meggison.⁸



(*stimulus*) yang datang dari luar diri seseorang. Stimulus yang masuk, akan diolah dulu dalam satu proses yang disebut “Perceptual Mechanism”. Dalam proses ini terjadi proses yang lebih kecil lagi, yakni seleksi, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus yang ada. Dalam proses inilah, berperan pengalaman serta norma-norma kemasyarakatan yang diyakini seseorang. Produk dari “Perceptual Outputs” itu dapat berwujud sikap, opini, ataupun perasaan terhadap stimulus, yang akhirnya akan menentukan tingkah laku seseorang.

Pemetaan pemilih merupakan fondasi dalam mendesain kampanye kompetisi elektoral yang efektif dan efisien. Pemetaan pemilih berusaha mengatasi model “asal kampanye” yang berakibat pada penghaburan-penghamburan sumber daya yang semestinya tidak

⁸ Karl H. Chung And Leon C. Meggison, *Organizational Behavior Developing Managerial Skill*, dalam Servatius Rodriques dkk, *Modul Sistem Politik Indonesia*, hal. 50

perlu dikeluarkan. Ada beberapa langkah untuk melakukan pemetaan pemilih yaitu:

Pertama, mengidentifikasi posisi awal dari partai atau kandidat dalam pasar pemilih dan partai pesaing. Langkah ini muncul terkait dengan argumen bahwa ketertarikan pemilih dengan kontestan dapat dijelaskan dengan model spasial. Dalam model ini pemilih akan cenderung memberikan suaranya pada partai atau seorang kontestan yang dianggap memiliki kesamaan serta kedekatan sistem dan keyakinan.

Kedua, melakukan segmentasi pemilih. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan karakter geografi (*perkotaan-pedesaan*), demografi (*jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan*), sosial-budaya (*etnik, abangan, santri*), okupasi (*petani, pedagang, PNS*), usia (*peilih peula, tua, muda*). Segmentasi dilakukan dengan tiga asumsi. Pertama, pemilih terdiri atas komponen-komponen yang tidak sama (*heterogen*). Kedua, Heteroginitas pemilih akan mempengaruhi tingkat dan jenis peilih. Ketiga, masing-masing segmen pemilih, dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan juga dapat dibedakan dengan karakteristik pemilih secara keseluruhan.

Ketiga, memilih target dari segmen pemilih yang ada untuk menjadi target kampanye partai atau kandidat. Semua dinamika peristiwa adalah sebuah gejala politik dalam konteks demokrasi. para

tim sukses perlu menekuni gejala-gejala itu dengan cermat, karena perlu dihitung teori voting dan pengembangannya.

b. Pendekatan Perilaku Pemilih

Dalam menganalisis perilaku memilih dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal tiga pendekatan utama yaitu:

1. Pendekatan Sociological School atau Mazhab Columbia

Penjelasan perilaku memilih dengan menggunakan analisis sosiologis pertama kali dikembangkan oleh sarjana Universitas Columbia maka pendekatan ini, dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, dan lingkungan tempat tinggal. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilu.

Menurut pendekatan ini, memilih bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah

predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat.⁹

Atau dengan perspektif lain, pendekatan sosiologis, tampaknya lebih cenderung pada analisis sistem sosial, atau stratifikasi sosial, misalnya kelompok muda-mudi, tua muda, dipercaya terhadap perilaku memilih. Di samping dengan memperhatikan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi seperti, organisasi kaum buruh, perkumpulan umat gereja, adalah organisasi atau perkumpulan yang mempunyai tujuan kepemimpinan, sistem komunikasi internal. Sifat ini, akan memberikan pengaruh terhadap persepsi individu, atau kelompok dengan lingkungannya. Preferensi, politik seseorang pemilih dalam pemilihan umum, dipengaruhi oleh latar belakang demografis, sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan dan agama.¹⁰

Sementara itu, Gerald Pomper merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam dua variabel yaitu predisposisi (*kecenderungan*) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik ayah atau ibu, akan berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial dan karakteristik demografis.

⁹ Yustiningrum E. & Ichwanuddin W. 2015. Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. Jurnal Penelitian Politik. Volume 12 (1). Hal 119

¹⁰ Sitepu Anthonius. 2012. Teori-Teori Politik. Graha Ilmu Yogyakarta. Hal 91

Mengenai peengkategorian karakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini, dibagi menjadi tiga tipe oleh Bone dan Ranney dalam (Khafifah dan Adi, 2016:1827)¹¹ yakni kelompok kategorial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya, dimana perbedaan ini terjadi karena, masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial. Pengelompokan kategorial ini terbentuk atas dasar faktor-faktor berikut:

- a. Perbedaan jenis kelamin
- b. Perbedaan usia
- c. Perbedaan Pendidikan

Kategori kedua adalah kelompok sekunder yakni kelompok yang menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya yang terdapat ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya. Kelompok ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan
- b. Kelas sosial dan status sosial ekonomi
- c. Kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama dan daerah asal

Tipe kelompok yang terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi

¹¹ Khafifah N. Dyah & Adi S. Agus. 2016. Perilaku Memilih Dalam Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 (Studi Pada Anggota IPNU dan IPPNU Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 3 (4) Hal 1827

langsung secara teratur dan sering. Kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Yang tergolong dalam kelompok ini adalah:

- a. Pasangan suami istri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Teman sepermainan

Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur (*tua-muda*), jenis kelamin (*laki-laki dan perempuan*) dan agama, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial, baik secara formal seperti, keanggotaan seseorang di dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi maupun kelompok informal seperti keluarga dan pertemanan, merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku memilih, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang pada kelompok-kelompok sosial tertentu, dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu. Hal ini, tidak terlepas dari seringnya anggota kelompok, organisasi profesi dan dan kelompok okupasi berinteraksi satu

sama lain, maka timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu kandidat yang mengikuti pemilu.

c. Tipe-tipe Pemilih

Menurut Firmanzah, perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis yaitu:¹²

1. Pemilih Rasional

Pemilih memiliki orientasi tinggi pada “policy problem solving” dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau kontestan dalam program kerjanya. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan. Pemilih jenis ini mulai banyak terdapat di Indonesia, terutama sejak lengsernya Soeharto dari pemerintahannya akibat reformasi.

2. Pemilih kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan

¹² Firmanzah. 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 134

dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah “rational voter” untuk berpaling ke partai lain.

Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis. Artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara sistem nilai partai (*ideology*) dengan kebijakan yang dibuat. Pemilih jenis ini harus dijaga sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan. Pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

3. Pemilih tradisional

Pemilih jenis ini, memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan

yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut.

Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye. Loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

4. Pemilih skeptis

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik jenis ini sangat kurang karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja atau 'platform' dan kebijakan sebuah partai politik.

Sedangkan menurut Efriza, secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama yaitu:

1. *Pemilih Rasional Kalkulatif*, pemilih tipe ini, adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini, berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
2. *Pemilih Primordial*, pemilih yang menjatuhkan pilihannya, lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini,

biasanya sangat mengagungkan simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini, lebih banyak berdomisili diperkampungan.

3. *Pemilih Pragmatis*, pemilih tipe ini, biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh, pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan dibeikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya, mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi kandidat.
4. *Pemilih Emosional*, kelompok pemilih ini, cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa atau pemilih pemula.